

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara demokrasi konstitusional. Setelah jatuhnya rezim orde baru yang otoriter pada tahun 1998, berbagai perubahan konstitusional telah dilakukan untuk melemahkan kekuasaan cabang-cabang eksekutif. Saat ini Indonesia ditandai oleh kedaulatan rakyat yang terwujud dalam pemilihan umum yang dianggap bebas dan adil. Pemilihan umum dilaksanakan secara nasional yaitu pemilihan presiden (pilpres), atau secara regional yaitu pemilihan umum kepala daerah (pemilukada).

Pemilukada merupakan ajang penyaluran aspirasi politik masyarakat lokal untuk memilih pemimpin daerah yang memiliki integritas pribadi yang baik dan jujur, sehingga pemerintahan dapat berjalan secara demokratis. Pemilukada tahun 2017 digelar secara serentak untuk daerah-daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2017. Sistem pemilihan kepala daerah serentak pada tahun 2017 merupakan kedua kalinya diadakan setelah pada tahun 2015. Pelaksanaan pemungutan suara digelar secara serentak pada tanggal 15 Februari 2017 yang digelar di 7 Provinsi, 18 Kota, dan 76 Kabupaten. Ketujuh provinsi tersebut adalah Belitung, DKI Jakarta, Banten, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Papua Barat.

DKI Jakarta melakukan Pemilihan umum Gubernur (berikutnya akan disingkat Pilgub DKI) untuk menentukan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017–2022. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi

DKI Jakarta menyelenggarakan tiga debat sebagai sarana para calon Gubernur dan calon wakil Gubernur untuk mengemukakan visi, misi, serta programnya. Debat tersebut diselenggarakan pada tanggal 13 Januari, 27 Januari, dan 10 Februari 2017 yang disiarkan langsung oleh beberapa stasiun televisi.

Forum debat kandidat atau dialog kandidat menjadi salah satu sarana untuk meningkatkan kualitas kandidat, karena dalam forum ini para kandidat akan menjelaskan latar belakang pencalonan serta agenda yang akan dilakukan seandainya terpilih. Para kandidat dapat pula meyakinkan rakyat dengan pikiran-pikiran konstruktif dan kritis. Masyarakat secara bebas dan demokratis akan mengetahui agenda yang ditawarkan para kandidat. Para kandidat pun dituntut bersaing dengan program dan visi-misi yang jelas dengan yang ditawarkan kandidat lain secara sehat. Debat tersebut terdiri atas enam sesi, yaitu sesi pertama pemaparan visi-misi, sesi ke-2, dan ke-3 para kandidat diberikan pertanyaan oleh panelis yang disampaikan oleh moderator. Kemudian pada sesi ke-4 dan ke-5 para kandidat saling melemparkan pertanyaan oleh kandidat satu pada kandidat yang lainnya. Sesi terakhir (ke-6) adalah sesi orasi para kandidat untuk mendapatkan dukungan dan meyakinkan para calon pemilih.

Kegiatan pilgub DKI Jakarta yang persiapannya sudah dimulai sejak tahun 2016 tersebut diikuti oleh tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Kandidat nomor urut pertama adalah mantan perwira TNI Agus Harimurti Yudhoyono dengan Sylviana Murni, kandidat nomor urut dua adalah Basuki Tjahaja Purnama yang dikenal sebagai "Ahok" mencalonkan diri sebagai petahana (*incumbent*) bersama pasangannya Djarot Saiful Hidayat. Kemudian,

kandidat nomor urut tiga merupakan akademisi dan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia yang diberhentikan oleh Presiden Indonesia, pada Juli 2015 yang lalu, yakni Anies Baswedan mencalonkan diri dengan Sandiaga Uno.

Ketiga pasangan dituntut menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan lugas pada saat debat berlangsung, Untuk menarik dukungan massa agar memilihnya, seorang kandidat harus dapat mengkomunikasikan dengan benar mengenai visi-misinya kepada masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari wujud tindak tutur pada forum debat kadidat. Searle (dalam Nadar: 2009) mengklasifikasikan tindak tutur dalam lima kategori berdasarkan pada jenis dan hakikat tindakan yang dilakukan penutur, yaitu asertif, direktif, ekspresif, komisif, dan deklaratif. Hal yang paling menarik dari kajian tindak tutur ini adalah bahwa satu tindak tutur ternyata dapat memiliki bentuk-bentuk tuturan yang mencerminkan maksud dan fungsi komunikasi yang bermacam-macam.

Selain visi-misi, dalam situasi persaingan antar-kandidat, para kandidat harus bisa menciptakan citra diri yang baik. Selama forum debat kandidat berlangsung, citra diri kandidat tidak hanya dilihat dari sikap tubuh (gestur), namun juga dari tuturannya. Citra diri harus dibangun oleh para kandidat dengan menunjukkan kesantunan berbahasa mereka. Kesantunan penting dalam penyelamatan muka mereka sendiri maupun lawan politiknya.

Kandidat yang dapat menjaga muka dirinya dan muka kandidat lainnya akan mendapat citra baik di mata masyarakat pemilih. Dalam prinsip kesantunan berbahasa, terdapat konsep wajah yang menjelaskan bahwa setiap orang memiliki dua muka atau keinginan yaitu muka/keinginan positif serta muka/keinginan

negatif. Dari penjabaran tersebut, penting kiranya membahas bagaimana sebuah bahasa digunakan para politikus untuk menjaga citra diri dengan menggunakan strategi kesantunan berbahasa dalam interaksi politik.

Perpolitikan di Indonesia semakin mendapatkan sorotan dikarenakan maraknya pemberitaan mengenai kurang santunnya para politisi dalam bertutur kata pada era reformasi. Beberapa diantaranya adalah pemberitaan mengenai pernyataan oleh mantan Ketua DPR-RI, Marzuki Alie yang menanggapi bencana tsunami yang terjadi di Mentawai, Marzuki mengatakan:

"Mentawai baru ada beritanya karena itu kan jauh pulau itu. Ya, pulau kesapu sama ombak besar kesapu tsunami mungkin konsekuensi orang yang tinggal di pulau lah. Kalau takut kena ombak jangan tinggal dipinggir pantai. Tapi kan Tsunami ini tentukan harus kita peduli". (via Tempo.com)

Pernyataan Marzuki Alie tersebut menuai kontroversi, sehingga Cendekiawan Sumatera Barat Dr Ir Ricky Avenzora, M.Sc, yang juga pengajar di Institut Pertanian Bogor menilai pernyataan Ketua DPR Marzuki Alie tentang bencana gempa dan tsunami di Mentawai naif dan melukai perasaan rakyat Sumbar, namun jika dicermati kembali meskipun tuturannya mengancam wajah mitra tuturnya (masyarakat mentawai) penutur tetap menggunakan strategi kesantunan berbahasa yang dirumuskan oleh Brown dan Levinson yaitu kesantunan positif yang ke-4, Meminimalkan paksaan (mengurangi kekuatan atau daya ancaman terhadap muka mitra tutur) dengan menggunakan kata “mungkin” yang berarti tuturan tersebut tidak sepenuhnya benar, karena hanya berupa pendapat.

Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang merupakan objek dalam penelitian ini. Ahok adalah seorang politisi yang memiliki fungsi dan kedudukan khusus di

DKI Jakarta. Ahok dikenal sebagai tokoh politik yang tegas dan penuh kontroversi karena tuturannya. Berbeda dengan dua kandidat yang merupakan saingannya dalam memperebutkan kursi Gubernur DKI Jakarta, Agus Harimurti Yudhoyono dan Anies Baswedan dikenal sebagai sosok yang santun dalam bertutur kata. Beberapa pengamat politik beranggapan, bahwa tutuan Ahok kerap tidak pantas diucapkan oleh seorang politisi yang mengakibatkan kekecewaan atau ketersinggungan mitra tuturnya.

Dua bulan menjelang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, tim pemenangan Ahok mengatakan bahwa ahok akan mengubah gaya berbahasanya menjadi lebih santun, dan untuk pembuktiannya dapat disaksikan dalam debat terbuka Pilgub DKI Jakarta 2017. Namun, pada saat debat pertama berlangsung, Ahok dinilai telah melakukan penghinaan terhadap profesi Dosen. Saat debat terbuka Pilkada DKI Jakarta pada tanggal 13 Januari 2017 berlangsung, Ahok menyebut calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Anies Baswedan penuh dengan retorika sehingga lebih cocok menjadi dosen. Menurut juru bicara tim pemenangan pasangan calon nomor urut 3, secara tidak langsung Ahok telah memandang rendah profesi dosen, dan seakan-akan dosen hanya mampu beretorika.

Hal tersebut mendorong peneliti untuk menganalisis lebih dalam mengenai penggunaan bahasa Ahok, dengan *image*-nya yang sering berbicara kasar, peneliti ingin melihat bagaimana realisasi kesantunan berbahasa Ahok, melalui tuturannya dengan menggunakan strategi kesantunan yang dirumuskan oleh Brown dan Levinson dalam debat yang telah disediakan oleh KPUD DKI Jakarta tersebut.

B. Identifikasi Masalah

1. Adanya wujud tindak tutur ilokusi yang digunakan Ahok pada saat debat Pilgub DKI Jakarta 2017.
2. Fungsi tindak tutur ilokusi yang digunakan Ahok pada debat Pilgub DKI Jakarta 2017.
3. Faktor yang mempengaruhi penggunaan tindak tutur ilokusi pada debat Pilgub DKI Jakarta 2017.
4. Adanya realiasi kesantunan berbahasa Ahok melalui strategi bertutur yang dilakukan pada debat Pilgub DKI Jakarta 2017.
5. Adanya pelanggaran atau penyimpangan prinsip kesantunan berbahasa yang dilakukan Ahok pada debat Pilgub DKI Jakarta 2017.
6. Faktor penyebab pelanggaran atau penyimpangan prinsip kesantunan berbahasa yang dilakukan Ahok pada debat Pilgub DKI Jakarta 2017.

C. Batasan Masalah

Suatu penelitian membutuhkan batasan masalah agar penelitian tersebut terarah dan tidak terlalu luas sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Pada pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 diikuti oleh tiga pasangan calon yang terdiri dari enam orang. Dalam penelitian ini, peneliti hanya menganalisis wujud tindak tutur dan realisasi kesantunan berbahasa Ahok melalui tuturannya dalam tiga debat resmi yakni tanggal 13, 27 Januari, dan 10 Februari yang disediakan oleh KPUD DKI Jakarta.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana wujud tindak tutur Ahok Pada debat pemilihan umum kepala daerah DKI Jakarta 2017?
2. Bagaimana realisasi kesantunan Ahok yang dikaji melalui tuturannya dengan menggunakan teori Brown dan Levinson, Pada debat Pilgub DKI Jakarta 2017?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui wujud tindak tutur yang digunakan Ahok Pada debat Pilgub DKI Jakarta 2017.
2. Mengetahui realisasi kesantunan Ahok yang dikaji melalui tuturannya dengan menggunakan teori Brown dan Levinson, dalam debat Pilgub DKI Jakarta 2017.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca, baik manfaat teoretis maupun manfaat praktis. Kedua manfaat tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan teori linguistik, khususnya kajian pragmatik. Selain itu, manfaat penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan teori kesantunan berbahasa dalam berbagai disiplin ilmu. Bagi peneliti dan orang-orang yang berminat mengkaji kesantunan berbahasa, diharapkan penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini adalah memberikan pengetahuan umum kepada masyarakat tentang fenomena penggunaan bahasa Ahok sebagai pelaku debat Pilgub DKI Jakarta yang sudah menjadi konsumsi masyarakat Indonesia karena penayangannya diberbagai stasiun Televisi, khususnya tentang kesantunan berbahasa. Penelitian ini juga diharapkan dapat meminimalkan pertikaian dan perselisihan dengan adanya penggunaan bahasa yang santun para pelaku debat. Secara umum juga diharapkan kualitas dan kuantitas penggunaan bahasa yang santun dalam acara debat dan acara formal lainnya akan meningkat.